



## Pemanfaatan SIPD sebagai Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dalam Perencanaan Anggaran Kecamatan Sidoarjo

Dewi Anisa Firdaus<sup>1\*</sup>, Chairil Anwar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [dewianisaaf@gmail.com](mailto:dewianisaaf@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the use of the Regional Government Information System (SIPD) as a management accounting information system in the budget planning process at the Sidoarjo District Office. This research applies a qualitative descriptive approach, with data obtained through semi structured interviews, observation of SIPD based budget planning activities, and documentation of planning and budgeting records. The findings show that SIPD has been used effectively to support budget planning, especially in preparing activity budgets, setting budget ceilings, and determining program priorities. The system enhances data integration, consistency, and transparency in the planning process. However, several challenges still exist, including limited staff competence and technical constraints of the system. These results show that although SIPD has an important role in improving the quality of budget planning, its effectiveness depends on user capability and system optimization. Therefore, strengthening human resource capacity and improving system performance are essential to achieving more effective and accountable budget planning.*

**Keywords:** *Budget Planning; Management Accounting; Regional Financial Management; Sidoarjo District; SIPD.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem informasi akuntansi manajemen dalam proses perencanaan anggaran di Kantor Kecamatan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi terhadap kegiatan perencanaan anggaran berbasis SIPD, serta dokumentasi terkait perencanaan dan penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan secara efektif dalam mendukung perencanaan anggaran, khususnya dalam penyusunan anggaran kegiatan, penetapan pagu anggaran, dan penentuan prioritas program. Sistem ini meningkatkan integrasi data, konsistensi, dan transparansi dalam proses perencanaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta kendala teknis pada sistem. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun SIPD memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pengguna dan optimalisasi sistem. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kinerja sistem menjadi hal yang penting untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih efektif dan akuntabel.

**Kata kunci:** Kecamatan Sidoarjo; Manajemen Keuangan; Perencanaan Anggaran; SIPD; Sistem Akuntansi Manajemen.

### 1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan perubahan yang berarti dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik. Transformasi digital yang dilaksanakan pemerintah bukan hanya difokuskan pada percepatan proses administrasi, namun juga ditujukan untuk membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi informasi sangat penting dalam mendukung pengelolaan berbagai kegiatan pemerintah,

termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih terintegrasi dan berbasis data (Setiyani, 2023).

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, kebutuhan akan sistem yang mampu menghubungkan berbagai tahapan menjadi semakin penting. Integrasi data merupakan salah satu elemen kunci untuk menjamin bahwa informasi yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah konsisten, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam penyusunan anggaran sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan data keuangan (Chalid dkk., 2024).

Salah satu cara pelaksanaan dari integrasi tersebut adalah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini dibuat untuk mendukung seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai laporan, dalam satu platform berbasis teknologi informasi. Penggunaan SIPD membantu pemerintah daerah dalam mengelola data dengan cara yang lebih teratur dan mendukung perencanaan anggaran yang lebih terencana serta berdasarkan pada informasi yang tepat (Arif & Firmansyah, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIPD dapat memberikan efek positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan sistem ini dinilai dapat meningkatkan kualitas perencanaan serta efektivitas pengelolaan anggaran melalui integrasi data yang lebih baik (Amadhea Viridiana Phita dkk., 2025; Lumintang dkk., 2025). Namun demikian, terdapat pula temuan yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama karena adanya keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta kendala teknis dalam sistem (Andriani dkk., 2023; Fauzan Alfarishi & Hartati, 2024).

Di samping itu, banyak penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pada implementasi SIPD di level pemerintah daerah secara umum, sementara kajian yang menempatkan SIPD sebagai sistem informasi akuntansi manajemen di tingkat kecamatan masih terbatas. Padahal, kecamatan berfungsi secara strategis sebagai unit pelaksana yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan anggaran di tingkat local. Perbedaan karakteristik organisasi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas tugas di tingkat kecamatan berpotensi mempengaruhi implementasi SIPD, namun hal ini belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini dilaksanakan untuk menganalisis penggunaan SIPD sebagai sistem informasi akuntansi manajemen dalam tahap perencanaan anggaran di

Kecamatan Sidoarjo. Studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fungsi SIPD dalam mendukung perencanaan anggaran, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Secara teori, studi ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam kajian akuntansi manajemen sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi dalam perencanaan anggaran. Secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan SIPD serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi untuk mengelola data berkaitan dengan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan aspek pemerintahan lainnya secara terintegrasi. Keberadaan sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa SIPD berfungsi sebagai alat untuk mendukung pengelolaan informasi pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Dalam implementasinya, SIPD dibuat untuk mendukung seluruh tahap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pelaporan dalam satu platform yang seragam. Integrasi tersebut memungkinkan setiap proses saling terhubung sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan konsistensi data. Dengan begitu, penerapan SIPD diharapkan dapat mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah karena semua aktivitas administrasi dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi secara digital.

### **Sistem Informasi Akuntansi Manajemen**

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen adalah sistem yang menyediakan informasi yang dipakai oleh manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan tidak hanya meliputi informasi keuangan, tetapi juga mencakup informasi nonkeuangan yang penting bagi kebutuhan organisasi. Melalui sistem ini, manajemen dapat mengevaluasi kinerja serta merencanakan penggunaan sumber daya secara lebih efektif (Romney & Steinbart, 2020).

Dalam konteks sektor publik, keberadaan sistem informasi akuntansi manajemen menjadi sangat penting, terutama dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Sistem ini berperan dalam membantu proses penyusunan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran, hingga

evaluasi kinerja program. Dengan adanya sistem yang terstruktur dan transparan, penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### **Perencanaan dan Penganggaran Daerah**

Perencanaan anggaran daerah adalah suatu rangkaian proses untuk merancang program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan yang ada. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan anggaran dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien (Bastian, 2020).

Dalam praktiknya, sistem penganggaran daerah di Indonesia menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini menyoroti hubungan antara distribusi anggaran dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, setiap pemanfaatan anggaran harus dapat dievaluasi melalui indikator kinerja yang spesifik dan terukur agar hasil yang diperoleh dapat dinilai secara objektif.

### **Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Implementasi SIPD dalam pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Hendra dan Pradana (2023) menyatakan bahwa penggunaan SIPD dapat meningkatkan integrasi data antara proses perencanaan dan penganggaran, sehingga penyusunan anggaran menjadi lebih sistematis dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi mampu memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala. Keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem serta adanya gangguan teknis menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan SIPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Selain itu, temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa penggunaan SIPD dapat mendukung pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan yang lebih tepat. Informasi tersebut menjadi landasan yang krusial dalam mendukung proses keputusan, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah.

### **Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi berperan sangat penting karena dapat menyediakan data yang tepat, cepat, dan terintegrasi. Adanya sistem informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur data keuangan dengan lebih efisien,

sehingga dapat mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran secara lebih baik (Khairani dkk., 2025).

Pemanfaatan sistem informasi juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi serta kualitas tata kelola keuangan sektor publik. Seluruh data yang tersimpan dalam sistem dapat diakses dan dipantau secara lebih terstruktur, sehingga memudahkan proses evaluasi serta pengambilan keputusan.

Studi yang dilakukan oleh Chintya et al., (2025) mengindikasikan bahwa penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini disebabkan karena seluruh data tercatat secara digital dan dapat dipantau secara lebih sistematis.

Dengan demikian, keberadaan sistem informasi seperti SIPD menjadi sangat krusial dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakses informasi secara lebih mudah, agar proses perencanaan anggaran bisa dilaksanakan dengan lebih terorganisir, transparan, dan berdasarkan data yang tepat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Studi ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pemanfaatan SIPD dalam proses perencanaan anggaran. Pendekatan deskriptif diterapkan untuk menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian.

Penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Sidoarjo sebagai tempat penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan pihak terkait dalam pengelolaan anggaran, serta dokumentasi data yang berhubungan dengan pemanfaatan SIPD.

Data yang didapat selanjutnya dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dipakai relevan dan mampu memberikan gambaran yang jelas terkait keadaan yang diteliti.

Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dinilai mampu meningkatkan efisiensi serta mempermudah proses pengolahan data dalam organisasi (Nikmatul Lailiyah & Chairil Anwar, 2025). Di samping itu, penggunaan sistem digital juga berperan dalam meningkatkan ketepatan data dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan organisasi (Anwar dkk., 2025).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pemanfaatan SIPD dalam Perencanaan Anggaran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sidoarjo, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahap perencanaan anggaran menunjukkan bahwa sistem tersebut telah dimanfaatkan secara terstruktur dan saling terhubung dari tahap awal hingga tahap penganggaran. Dalam praktiknya, SIPD berfungsi sebagai media utama yang mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam satu sistem yang sama.

Tahapan perencanaan dimulai dari penyusunan dokumen seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam memasukkan program dan kegiatan ke dalam SIPD. Selanjutnya, data yang telah dimasukkan diproses oleh sistem untuk menghasilkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dijadikan panduan dalam perencanaan APBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan SIPD mampu mengurangi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang sebelumnya sering terjadi.

Apabila dianalisis lebih lanjut, pemanfaatan SIPD mencerminkan penerapan konsep sistem informasi akuntansi manajemen dalam sektor publik. Sistem ini dapat menyajikan informasi yang terorganisir dengan baik, relevan, dan tersedia pada waktu yang tepat, agar dapat mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih berdasarkan data. Selain itu, adanya keterkaitan antara alokasi anggaran dengan indikator kinerja dalam sistem juga menunjukkan bahwa SIPD telah mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Namun demikian, tingkat optimalisasi penggunaan SIPD bukan hanya ditentukan oleh sistem itu sendiri. Kualitas data yang dimasukkan serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Kesalahan dalam proses penginputan maupun keterbatasan pemahaman terhadap sistem dapat berdampak pada kurang optimalnya hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, meskipun sistem telah terintegrasi, dukungan sumber daya manusia yang cukup tetap menjadi hal yang sangat diperlukan.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada data. Hal ini sejalan dengan konsep sistem informasi akuntansi manajemen yang menekankan pentingnya informasi yang relevan, tepat waktu, dan terintegrasi dalam proses perencanaan serta pengawasan organisasi. Dengan demikian, penggunaan SIPD

dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui penyediaan informasi yang lebih akurat dan sistematis.

### **Kendala dan Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya**

Meskipun SIPD memberikan berbagai kemudahan dalam dalam proses perencanaan anggaran, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapannya masih mengalami sejumlah rintangan. Masalah yang teridentifikasi mencakup keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, kendala teknis sistem seperti akses yang lambat atau gangguan sistem, serta proses penyesuaian pengguna terhadap sistem yang masih berlangsung.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya tergantung pada teknologi yang dipakai, namun juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam mengadopsinya. Ketika pengguna belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap sistem, maka pemanfaatannya menjadi kurang optimal dan berdampak pada kualitas informasi yang diperoleh.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan SIPD mampu meningkatkan kualitas perencanaan serta efektivitas pengelolaan anggaran melalui integrasi data (Amadhea Virdiana Phita et al., 2025; Lumintang et al., 2025). Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berhubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan permasalahan teknis sistem (Andriani et al., 2023; Fauzan Alfarishi & Hartati, 2024).

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa SIPD mempunyai kemampuan yang signifikan dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran. Namun, kesuksesannya sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur yang cukup. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor publik tidak hanya harus berfokus pada teknologi, tetapi juga harus seimbang dengan peningkatan kapasitas pengguna dan kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan. Kolaborasi antara elemen teknologi dan manusia menjadi aspek krusial dalam mengoptimalkan penggunaan SIPD secara berkelanjutan.

### **Implikasi Penelitian**

Dari sudut pandang teoretis, studi ini mendukung anggapan bahwa sistem informasi memiliki peran penting dalam akuntansi manajemen sektor publik, khususnya dalam mendukung fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran. SIPD sebagai sistem yang terintegrasi mampu memberikan data yang penting untuk proses pengambilan keputusan manajerial.

Dari segi praktis, temuan penelitian ini menawarkan gambaran kepada pemerintah daerah, terutama Kecamatan Sidoarjo, mengenai signifikansi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi, serta pengoptimalan pemanfaatan fitur sistem secara menyeluruh.

Di samping itu, dibutuhkan evaluasi dan pendampingan yang terus-menerus agar pemanfaatan SIPD tidak sekadar administratif, melainkan benar-benar digunakan sebagai alat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, implementasi SIPD diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, bertanggung jawab, dan berfokus pada hasil.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Studi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan SIPD sangat penting dalam mendukung proses perencanaan anggaran pada tingkat kecamatan. Sistem ini bukan hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai media yang memberikan informasi yang relevan untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, penggunaannya belum sepenuhnya efisien akibat adanya berbagai hambatan, seperti keterbatasan keahlian sumber daya manusia, masalah teknis sistem, serta proses adaptasi pengguna yang masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa suksesnya penerapan sistem tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada persiapan pengguna dan dukungan infrastruktur.

Karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan yang berkelanjutan serta melakukan perbaikan terhadap infrastruktur teknologi yang tersedia. Selain itu, pemanfaatan fitur SIPD perlu dioptimalkan agar sistem ini tidak hanya berfungsi untuk urusan administratif, tetapi juga sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini terbatas karena hanya dilaksanakan di satu kecamatan, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasikan secara luas. Dengan demikian, penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas objek yang diteliti atau melakukan perbandingan antar lokasi, serta menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Kecamatan Sidoarjo atas izin dan dukungan yang diberikan dalam menjalankan penelitian ini, serta kepada semua informan yang telah berkontribusi dan memberikan data yang diperlukan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan petunjuknya, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Amadhea Virdiana Phita, Iqbal Noor, & Acep Suherman. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Anggaran Sebagai Upaya Mewujudkan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(1), 823–844. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i1.5576>.
- Andriani, Y., Umrah, S., & Husen, M. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada BPKAD Bidang Anggaran Kabupaten Raja Ampat. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/>.
- Anwar, K. C., Intan, M., Aini, N., & Anwar, C. (2025). Artikel Praktek Kerja Lapang Akuntansi Kesiapan Sistem Pencatatan Digital dalam Mendukung Perkembangan E-Commerce pada Perusahaan Perdagangan. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/pkla/>.
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar (Vol. 3, Nomor 1).
- Bastian, I. (2020). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.
- Chalid, I., Nyengka, D., Marlissa, E. R., & Aedah2, N. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Anggaran pada BKPSDM Kabupaten Jayapura (Vol. 7, Nomor 1).
- Chintya, P., Putri, N., & Purnamawati, G. A. (2025). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>.
- Fauzan Alfarishi, A., & Hartati, S. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. 13(1), 2085–2401. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14062597>.
- Hendra, A., & Pradana, R. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Anggaran untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 122–134. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1.3669>

- Khairani, S., Yulanda, K., Nurmala Sari, E., & Sitasi, C. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Tata Kelola Keuangan di Sektor Publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 25(2), 57–66. <https://doi.org/10.30596/25962>.
- Lumintang, R., Morasa, J., & Kindangen, W. D. (2025). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 387–397. <https://doi.org/10.58784/rapi.356>.
- Nikmatul Lailiyah, & Chairil Anwar. (2025). Pengaruh Penggunaan Financial Technology dan Media Sosial terhadap Peningkatan Pendapatan di UMKM Sidoarjo. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(2), 53–64. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i2.5726>.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). *Accounting Information Systems*.
- Setiyani, N. A. (2023). Volume, 2 Nomor 2 Desember 2025 Efektivitas Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia.